

IMPLEMENTASI USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL di ERA DIGITAL REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Fifi Julfiati

Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika – STMIK Eresha

Email : flafayza.maliha@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan kajian pustaka yang membahas tantangan Peran Pekerja Sosial dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial di Era Digital Revolusi Industri. Sejak awal sistem usaha-usaha kesejahteraan sosial ini masih dilakukan secara top down, karena minimnya peran serta masyarakat dan kuatnya peran pemerintah untuk memutuskan kebijakan-kebijakan sistem usaha kesejahteraan sosial sehingga usaha kesejahteraan sosial yang diselenggarakan di Era Digitalisasi Revolusi Industri 4.0 ini marak dengan usaha-usaha yang berbasis profit oriented. Masyarakat melakukan Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial secara mandiri melalui media Digitalisasi,

Kata Kunci : Peran Pekerjaan Sosial, Sistem Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial, Era Digital Revolusi Industri 4.0

1. Pendahuluan

Pada hakekatnya telah menjadi kewajiban dari suatu negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara dan berupaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Perwujudan tersebut dilaksanakan melalui suatu kegiatan pembangunan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan manusia melalui berbagai kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan lingkungan).

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita Bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan Nasional Bangsa yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk memajukan tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk

diantaranya usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Iskandar Jusman (1995:112) mengatakan bahwa Pekerja Sosial (Social Worker) harus dapat bertanggung jawab dalam bidang usaha-usaha kesejahteraan sosial dan berperan untuk membantu pemerintah dengan program-program yang disediakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini seperti mengindikasikan bahwa pemerintah harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pekerja sosial untuk berperan mengelola program-program perbaikan taraf kesejahteraan warga masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, keluarga dan masyarakat sehingga diharapkan mampu memberikan perubahan secara signifikan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Masyarakat yang berkesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pekerja sosial dalam melakukan perannya menitikberatkan pada tindakan-tindakan pertolongan dan pemberdayaan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini nampak terlihat pada kegiatan-kegiatan di yayasan sosial, rumah singgah, panti-panti atau tempat-tempat rehabilitasi, kemudian mulai berkembang menangani korban bencana, perang, pengungsi. Dengan demikian secara nyata dapat dikatakan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang aktif dalam kehidupan masyarakat.

Pada saat ini Pekerja Sosial terhimpun didalam Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1998, yang anggota-anggota tersebar di seluruh nasional. Dengan kemampuan dan kapasitas pendidikan baik berupa teori-teori, nilai-nilai dan norma, serta pengalaman praktik yang pernah dilakukan, pekerja sosial profesional keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan negara.

Saat ini peran pekerja sosial mengalami dilema, karena masalahnya bidang pekerjaan yang berkaitan dengan masalah sosial dan kesejahteraan sosial bukan hanya ditangani oleh pekerja sosial sendiri, tetapi banyak profesi lain juga turut berperan didalam permasalahan sosial. Itulah sebabnya, profesi pekerjaan sosial harus meningkatkan pendidikan dan kemampuan profesionalnya. Meskipun Setiap tahunnya telah banyak lulusan dari lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial seperti misalnya STKS Bandung, IISIP Jakarta, STISIP Widuri Jakarta, namun, gaung pekerja sosial profesional belum mampu menjadi sorotan masyarakat ramai. Menurut Laporan Tahunan STKS Bandung (2011) lembaga pendidikan kedinasan tersebut telah menghasilkan lulusan sebanyak 11.067 belum lagi ditambah lulusan dari berbagai lembaga pendidikan lain di Indonesia maupun Pekerja Sosial yang bernaung di bawah Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI), tentu jumlahnya sangat banyak. Ironisnya, ditengah-tengah upaya untuk menjadikan profesi pekerjaan sosial sebagai suatu pekerjaan yang profesional dan diakui di kalangan masyarakat, masih banyak kendala-kendala yang mesti dihadapi. Maraknya Pekerja sosial yang kurang profesional (amatir), yang lulus dari berbagai disiplin ilmu pendidikan, juga banyak berkiprah

dalam melakukan pekerjaan sosial. Akhirnya terjadi perebutan lahan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah sosial dan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Di dalam Millenium Development Goals atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai "Tujuan Pembangunan Millenium" pada bulan September tahun 2000 yang dihadiri 189 negara anggota PBB berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program dari pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan dan pembangunan yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu: (1) Menanggulangi masalah kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai Pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong Kesamaan Gender dan pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) Meningkatkan Kesehatan ibu; (6) Perang melawan HIV/AIDs; malaria dan penyakit menular lainnya (7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; (8) Membangun kemitraan global. Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakannya, Dalam melihat program MDGs dan komitmen pemerintah tersebut jelas bahwa dibutuhkan peran pekerja sosial untuk merealisasikannya. Menteri Sosial RI Agus Gumiwang pada pidato Wisuda kelulusan Mahasiswa STKS menyatakan bahwa "Saat ini adalah era revolusi industri 4.0 menekankan pada pola digital ekonomi, *artificial intelligence*, dan *big data*. Menghadapi tantangan tersebut, Pekerja Sosial harus menciptakan peluang misalnya ditengah maraknya informasi diberbagai media social maupun aplikasi pesan, Pekerja Sosial dapat mengajak masyarakat lebih selektif dan menyaring dengan baik informasi yang masuk". Saat ini Telepone Selular dan teknologi Digital lainnya menyebar dengan cepat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Teknologi baru, analisa data, dan media sosial berdampak sangat besar pada cara orang berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerja. Tenaga kerja yang tersedia akan semakin beragam dan jenjang karier nonprofessional akan ditinggalkan. Agar dapat

berperan secara profesional di era digitalisasi ini, Pekerja Sosial harus mau dan mampu meningkatkan kapasitasnya (*Capacity building*) melalui pembenahan diri dan kelompok, mengasah ketrampilan yang dimiliki, peningkatan pengalaman praktik di lapangan, ikut serta dalam Sertifikasi Profesi untuk dapat disebut sebagai pekerja sosial profesional. Berdasarkan uraian-uraian di atas perlu diketahui : Apakah pekerja sosial profesional mampu memainkan perannya dalam di era Digital? Apakah peran yang bisa dilakukan oleh Pekerja Sosialis Profesional di Era Digital Revolusi Industri 4.0 saat ini ?

2. DASAR TEORI

2.1 Pengertian Pekerja Sosial

Menurut Charles Zastrow (1982), yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco (1995:7) pengertian pekerjaan sosial adalah sebagai berikut :

"Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan".

Dari pengertian di atas, maka seorang pekerja sosial harus bisa membantu dan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian elemennya yang menjadi para pemeran berbagai peran yang ada di dalam masyarakat. menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dengan hubungan-hubungan yang ada didalamnya untuk bisa memberikan keterikatan di antara para pemegang peran tersebut.

2.2 Pengertian Peran Pekerja Sosial

Pengertian Peran

Definisi peran menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (1997) adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan ^e. masyarakat.

Sedangkan Soerjono Soekanto (1990) mendefinisikan peranan sebagai : "Suatu konsep perihal apa-apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat".

Peranan Pekerjaan Sosial

Menurut Heru Sokoco (1995:22-27) Peranan Pekerja Sosial adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pemercepat perubahan (*enabler*)

Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses Sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

b. Peran sebagai perantara (*broker*)

Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, *stake holder* seperti lembaga-lembaga sosial, yayasan sosial maupun Pemerintah dalam hal ini Kemensos, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

c. Pendidik (*educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, Pekerja Sosial diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

d. Tenaga ahli (*expert*)

Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat).

e. Perencana sosial (*social planner*)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional dalam mengakses Sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

f. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses-proses perubahan individu-individu maupun kelompok-kelompok, dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Jim Iff, 2002, memberikan pendapatnya mengenai **peran** pekerja sosial antara lain:

a. Peranan Fasilitatif

Peranan praktek yang dikelompokkan ke dalam peranan fasilitatif merupakan peranan yang dicurahkan untuk membangkitkan semangat atau memberi dorongan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat untuk menggunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha secara efisien. Melakukan mediasi dan negosiasi yaitu pekerja sosial memerankan diri sebagai mediator dalam pemanfaatan lahan dengan pihak lain untuk memperluas aktivitas kerjasama dengan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Memberikan *support/dukungan*, yaitu memberikan dukungan untuk memperkuat, mengakui dan menghargai nilai yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat menghargai kontribusi dan kerja mereka.

b. Peranan Educational

Pekerja sosial memainkan peranan dalam penentuan agenda, sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses

peningkatan produktivitas akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Peran pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi, mengkonfrontasikan, melakukan pelatihan bagi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

c. Peranan-peranan Representasional

Pekerja sosial melakukan interaksi dengan badan-badan di masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Peranan ini dilakukan, antara lain dengan : mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, seperti bantuan modal usaha, pelatihan pengembangan potensi dan produktivitas dari berbagai donator. Melakukan advokasi untuk membela kepentingan-kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat seperti mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut. Memanfaatkan Media Masa untuk memperkenalkan hasil produksi. Selain itu juga bertujuan menerima dukungan dari pihak lain yang lebih luas; membuka jaringan kerja, dengan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak, kelompok dan berupaya mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya pengembangan potensi, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat' selain itu pula, pekerja sosial berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan stakeholder.

d. Peranan Teknis

Di sini pekerja sosial melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis, manajemen serta melakukan pengendalian finansial, dan melakukan *need assessment* terhadap pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Peran-peran ini dapat

dilakukan pekerja sosial bersama individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat melakukan mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan baik untuk mengundang perhatian dari stakeholders untuk mengembangkan potensi tetapi juga membantu mempromosikan.

Dengan demikian, peran pekerja sosial memiliki posisi yang sangat penting (*urgent*) dalam pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.3 Peran Pekerja Sosial dalam Sistem Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Profesi ini berfungsi untuk melakukan analisis kebijakan dan perencanaan kesejahteraan sosial, memperbaiki dan meningkatkan kehidupan sosial, mengembangkan sumber daya manusia, melakukan penyembuhan sosial, rehabilitasi sosial, mencegah timbulnya masalah sosial, memberdayakan kelompok rentan, dan lain sebagainya. Hubungan antara usaha kesejahteraan sosial dengan Pekerjaan Sosial dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Penjelasan Undang-Undang di atas dapat diartikan bahwa pekerjaan sosial dapat dilakukan oleh siapa saja baik individu maupun kelompok yang memiliki kompetensi untuk mendayagunakan semua potensi yang ada guna mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Secara khusus tujuan pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial anggota masyarakat yang mengalami masalah, sehingga mereka mampu mengatasi masalahnya sendiri

(selfhelp services), membantu adaptasi sosial, dan melakukan perubahan sosial di lingkungannya agar sumber daya yang ada dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Seperti yang telah dirumuskan oleh Pincus dan Minahan (1973:9) dalam buku *Social Work Practice* yang menyatakan tujuan dari pekerjaan sosial adalah :

1. Enhance the problem solving and coping capacities of people (Mempertinggi kemampuan orang untuk memecahkan dan menanggulangi masalahnya).
2. Link people with system that provide them with resources, service, and opportunities (Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan).
3. Promote the effective and humane operation of these system (Meningkatkan pelaksanaan sistem-sistem tersebut secara efektif dan manusiawi).
4. Contribute to the development and operation of these system (Memberikan sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan kebijakan sosial).

Sekarang ini, profesi Pekerja Sosial ini telah memiliki kode etik tersendiri di dalam melakukan usaha-usaha Kesejahteraan sosial. Kode etik ini adalah pedoman perilaku bagi anggota Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) dan merupakan landasan untuk memutuskan persoalan-persoalan etika bila perilaku pekerja sosial profesional dinilai menyimpang dari standar perilaku etis dalam melaksanakan tugasnya , yaitu :

(1) Perilaku Pribadi; (2) Kemampuan Profesional; (3) Service atau pelayanan; (4) Integrity atau integritas; (5) Keilmuan dan Penelitian;. Oleh karena itu, pekerja sosial bisa disebut sebagai pekerja profesional jika memenuhi persyaratan di atas. Pekerja sosial harus mampu memberikan layanan kepada semua orang dengan berbagai latar belakang, sosial maupun jenis umur. Mereka diharapkan membantu semua orang dengan pengalamannya untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapinya, seperti misalnya, anak jalanan, pengemis dan gelandangan,

KDRT, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Namun, sesungguhnya ruang lingkup dari pekerjaan sosial lebih luas dari apa yang telah diberikan terhadap individu, keluarga, atau mungkin kelompok kecil dan masyarakat. Seringkali tidak terlihat, tetapi ternyata penting bahwa misi dari pekerjaan sosial sampai kepada pembelaan (advocacy) keadilan sosial bagi orang-orang yang suara hatinya tidak terdengar oleh penguasa, misalnya orang miskin, anak-anak yang kurang beruntung atau mengalami kekerasan, dan orang tertindas. Pekerjaan sosial juga bekerja sebagai administrator di lembaga sosial dan pemberian pertimbangan untuk menjamin kualitas pelayanan terhadap program dan layanan yang diberikan. Selain itu, pekerja sosial dapat bekerja sebagai analis kebijakan, pelobi politik, pembela, pendidik, dan juga peneliti sosial. Dengan terus berkembangnya ilmu dan pengetahuan mengenai kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, maka pekerja sosial harus berupaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, yang berupa teori dan praktik, sehingga dapat melakukan pembelaan terhadap masalah keadilan sosial dan perubahan sosial bagi klien. Pekerja sosial juga menggunakan etika dan budaya (sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial) yang berbeda-beda untuk mengurangi diskriminasi, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidak-adilan lainnya. Kesemuanya itu merupakan bentuk pelayanan langsung (direct services) terhadap kepentingan masyarakat. Menurut Edi Suharto (2010: 21) misi yang diemban oleh pekerja sosial di dalam kerangka kesejahteraan sosial adalah, (1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; (2) memperkuat kepedulian masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sejalan dengan prinsip masyarakat peduli (caring society) dan kesetiakawanan sosial; (3) memantapkan dan mengembangkan keberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat melalui sistem perlindungan sosial yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

2.4 Revolusi Industri 4.0

Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan dan komputasi kognitif.

Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas". Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

Istilah "Industrie 4.0" berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik.

Istilah "Industrie 4.0" diangkat kembali di Hannover Fair tahun 2011. Pada Oktober 2012, Working Group on Industry 4.0 memaparkan rekomendasi pelaksanaan Industri 4.0 kepada pemerintah federal Jerman. Anggota kelompok kerja Industri 4.0 diakui sebagai bapak pendiri dan perintis Industri 4.0.

4.1 Prinsip rancangan

Ada empat prinsip rancangan dalam Industri 4.0. Prinsip-prinsip ini membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario Industri 4.0.

1. Interoperabilitas (kesesuaian): Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet untuk segala (IoT) atau Internet untuk khalayak (IoP). IoT akan mengotomatisasikan proses ini secara besar-besaran
2. Transparansi informasi: Kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan

memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks bernilai tinggi.

3. Bantuan teknis: Pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Kedua, kemampuan sistem siber-fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia.
4. Keputusan mandiri: Kemampuan sistem siber-fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan, tugas didelegasikan ke atasan.

Dampak Industri 4.0

Industri 4.0 akan mempengaruhi banyak bidang, terutama:

1. Model layanan dan bisnis
2. Keandalan dan produktivitas berkelanjutan
3. Keamanan TI: Perusahaan seperti Symantec, Cisco, dan Penta Security sudah mulai membahas masalah keamanan IoT
4. Keamanana mesin
5. Penjualan pabrik
6. Siklus hidup produk
7. Industri Manufaktur: Perubahan masal pabrik menggunakan IoT, Pencetakan 3D dan Pembelajaran Mesin
8. Rantai nilai industri
9. Pendidikan dan skill pekerja
10. Faktor sosio-ekonomi
11. Peragaan Industri: Untuk membantu industri memahami dampak Perindustrian 4.0, Cincinnati Walikota John Cranley, menandatangani proklamasi untuk menyatakan "Cincinnati menjadi Kota Peragaan Industri 4.0".
12. Sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Februari 2016 menunjukkan bahwa Industri 4.0 mungkin memiliki efek menguntungkan bagi negara berkembang seperti India.

Industri kedirgantaraan kadang dikategorikan "terdampak rendah untuk otomasi masal" namun prinsip-prinsip Industri 4.0 telah diselidiki oleh beberapa perusahaan kedirgantaraan, teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas di mana biaya awal otomatisasi tidak dijelaskan, salah satu contohnya adalah proyek M4 oleh pabrik komponen penerbangan Meggitt PLC.

Diskusi tentang bagaimana pergeseran ke Industri 4.0, khususnya digitalisasi, akan mempengaruhi pasar tenaga kerja sedang dibahas di Jerman dengan topik Pekerjaan 4.0.

3. Implementasi Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial

Sistem Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial merupakan pengembangan lembaga sosial untuk menyediakan layanan berbagai kondisi dari ketergantungan berbagai kelompok rentan dan disabel ditengah masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas lagi usaha-usaha kesejahteraan sosial dapat disebut dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara Inggris, memahami konsep *Welfare state* sebagai *alternative* terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan *stigma*, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan Negara Inggris, Andersen (2012) dalam salah satu studinya mengungkapkan bahwa "*Welfare state* merupakan institusi Negara dimana kekuasaan yang dimilikinya ditujukan untuk :

1. Memastikan setiap warga Negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan
2. Memberikan pelayanan sosial bagi setiap permasalahan yang di alami warga Negara (baik dikarenakan sakit, tua atau menganggur) serta kondisi lain semisal krisis ekonomi.
3. Memastikan setiap warga Negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas, ekonomi, dan perbedaan lain.

Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, kelompok, dan masyarakat, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, yakni merupakan tanggung jawab negara. Pengagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan "bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat."

Dengan melihat batasan yang dibuat PBB ini tampak bahwa penekanannya pada suatu kegiatan atau aktivitas yang terorganisasi. Batasan tersebut telah mementingkan aturan-aturan permainan, seperti ditunjukkan oleh kalimat "through the use of technique and methods". Barangkali pengertian "technique" dan "methods" di sini belum bersangkutan paut dengan metodologi dalam ilmu pengetahuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa PBB telah melihat kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh berbagai institusi, yang usaha-usaha untuk meningkatkan "welfare" tidak melalui teknik dan metode yang teratur, tetapi bersifat sporadis dan bahkan tidak berdasarkan praktik profesional.

4. PEMBAHASAN

4.1 Peran Pekerja Sosial di Era Digital Industri 4.0

Peran Pekerja sosial mengacu empat prinsip rancangan dalam Industri 4.0. Prinsip-prinsip ini membantu peran pekerja sosial mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario Industri 4.0.

1. Interoperabilitas (kesesuaian): Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet untuk segala (IoT) atau Internet untuk khalayak (IoP). IoT akan mengotomatiskan proses ini secara besar-besaran.

Kesejahteraan pada awal mulanya hanya menunjuk pada pola-pola tradisional dengan

membantu orang-orang miskin yang menerima bantuan dari program yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta melalui lembaga sosialnya, Kemudian berkembang dan saat ini konsep kesejahteraan menjadi sangat luas dan mencakup kegiatan lain dari program kesejahteraan yang ada di tengah masyarakat. Berkembangnya konsep kesejahteraan tidak terlepas dari perkembangan peradaban masyarakat yang terus maju dan mendunia. Membuat aplikasi pembinaan yang disebut "digital inclusion". Berbasis cloud computing, dimana masyarakat dibina untuk bisa memanfaatkan teknologi digital secara maksimal sesuai dengan jati diri bangsa. Dengan begitu tidak hanya menggunakannya untuk komunikasi pertemanan dan persahabatan, tapi bisa untuk kepentingan lainnya seperti pendidikan, ekonomi dan bisnis.

2. Transparansi informasi: Kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks bernilai tinggi.

Pekerja Sosial bisa mengadaptasi program pembinaan digital ini tidak melalui mengajarkan masyarakat bagaimana cara mengakses internet, bagaimana cara mengiklankan sebuah produk, membuka toko online, mencari pertemanan.

Namun, lebih jauh dari itu perlu diajarkan bagaimana etika dalam pergaulan di internet, bagaimana interaksi budaya digital, bagaimana pola hidup sehat bersosial media dengan manajemen gadget, kapan kita boleh menggunakan *gadget*, dan kapan sebaiknya tidak menggunakannya (dalam 24 jam).

3. Bantuan teknis: Pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Kedua, kemampuan sistem siber-fisik untuk membantu manusia secara

fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia.

4. Keputusan mandiri: Kemampuan sistem siber-fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan, tugas didelegasikan ke atasan.

Pada prinsip ini Peran-peran yang bisa dilakukan Pekerja Sosial adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Konselor dengan melakukan konseling online kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti masalah KDRT atau kekerasan yang dialami Perempuan dalam rumah tangga anak-anak. Pekerja social dapat membuat form registrasi online, pencatatan dan filling data based klien.
2. Sebagai Educator, Pekerja social dapat membuat website yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyampaikan berita yang baik dan benar dan tidak menyebarkan berita yang bohong atau Hoak, juga memberikan saran pemakaian media social yang positif bagi keluarga dan anak-anak.
3. Penghubung, Pekerja Sosial dapat menghubungkan klien dengan sistem sumber dengan cara mencari informasi melalui media social atau internet.
4. Mediator, Pekerja Sosial melakukan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain
5. Fasilitator, Pekerja Sosial menyediakan tempat belajar untuk mengakses internet positif bagi masyarakat atau keluarga.

Di Negara Indonesia paradigma digital masyarakat yang konstruktif belum terbangun. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih berfokus pada pemanfaatan media sosial semata, belum didominasi

dengan pemahaman yang lebih maju bahwa dunia digital bisa dioptimalkan lebih maksimal lagi, tidak saja untuk berkomunikasi dalam kapasitas pergaulan dan persahabatan, dan keluarga tapi juga bisa untuk sharing knowledge, aktualisasi diri, pelayanan sosial hingga motif bisnis dan ekonomi. Revolusi digital terus berkembang sejak tahun 1980an dengan perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital dan terus berkembang hingga kini. Perkembangan teknologi ini menjadi sangat masif setelah penemuan personal komputer yaitu sistem yang dirancang dan diorganisir secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output dibawah kendali instruksi elektronik yang tersimpan di memori yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat. Perkembangan teknologi komputer digital khususnya mikroprosesor dengan kinerjanya terus meningkat, dan teknologi ini memungkinkan ditanam pada berbagai perangkat yang dimiliki secara personal. Perkembangan teknologi transmisi termasuk jaringan komputer juga telah memicu para pengguna internet dan penyiaran digital. Ditambah perkembangan smatphone, yang tumbuh pesat menjadi perangkat untuk bermedia sosial memainkan peran besar dalam revolusi digital dengan memberikan hiburan di mana-mana, komunikasi, dan konektivitas online. Lahirnya situs jejaring sosial seperti facebook, twitter yang merupakan sebuah pelayanan berbasis web, memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut.

Menurut H.Sukamta (2017) bahwa: Teknologi digital ini bukanlah sebuah "fad", gejala sesaat yang akan hilang begitu saja. Teknologi ini telah dan terus akan tumbuh serta memiliki dampak panjang dalam kehidupan kita. Kemudahan-kemudahan yang dibawanya sedikit banyak telah mengubah pola hidup masyarakat. Siapkah Pekerja Sosial menghadapi perubahan itu semua dengan dinamika permasalahan di masyarakat yang terus berkembang. Untuk itu, sangatlah penting bagi semua pekerja sosial dapat memahami ruang lingkup

pekerjaan sosial, kemudian mengerti tujuan sistem usaha-usaha kesejahteraan sosial, dan peran-peran apa saja yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial dan lembaga-lembaga sosial di dalam usaha kesejahteraan sosial di era digital saat ini. Menteri Sosial M Agus Gumiwang Kartasasmita (2017) mengatakan: "Pekerja Sosial harus menciptakan peluang misalnya di tengah maraknya informasi di berbagai media sosial maupun aplikasi pesan, Pekerja Sosial dapat mengajak masyarakat lebih selektif dan menyaring dengan baik informasi yang masuk. Mendorong masyarakat menjadi pembelajar terus menerus sehingga menjadi masyarakat sadar informasi dan bisa turut berpartisipasi aktif dalam menekan hoax yang kini makin marak,"

Dalam perkembangan teknologi digital ini tentu banyak dampak yang dirasakan masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Menurut W, Setiawan (2016)

Dampak positif era digital antara lain:

- a) Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya.
- b) Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita.
- c) Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat.
- d) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- e) Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- f) Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya.

Adapun dampak negatif era digital yang harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya, antara lain:

- a) Ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiat akan melakukan kecurangan.
- b) Ancaman terjadinya pikiran pintas dimana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi.
- c) Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan, dan lain-lain (menurunnya moralitas).
- d) Tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti selain men-download e-book, tetapi juga mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan, dan lain-lain.

4.2 Tantangan Bagi Pekerja Sosial di Era Industri 4.0

Dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis semata. Namun juga memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan. Begitu juga di bidang Kesejahteraan Sosial. Penggunaan bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Karena perkembangan teknologi yang begitu cepat mampu mengubah tatanan sosial, budaya masyarakat, perilaku masyarakat dan juga meningkatkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Menurut W. Setiawan (2016) Dalam bidang sosial, era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antar orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti

komputer terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Komputer yang disambungkan dengan telpon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bersosial langsung

5. Kesimpulan

Berkembangnya teknologi di era digital dan revolusi industri 4.0 membuat perubahan besar pada tatanan kehidupan masyarakat, selain melahirkan permasalahan-permasalahan sosial, era digital juga memberikan ide-ide baru yang semakin maju dan berkembang. Disinilah Pekerja Sosial dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya untuk mengatasi perkembangan jaman. Pada era digital ini peran-peran Pekerja Sosial semakin meningkat dan rumit. Perlu dirumuskan peran-peran apa yang cocok dan sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang dicitakan dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Andersen ,J.G. (2012) *Welfare State and Welfare State Theory*, Centre for Comparative Welfare Studies, Working Paper.
- Bintarto, R. (1980) *Gotong Royong: Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Bambang Suwondo (1982) *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud,
- Conyers Diana (1991) *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Djohani, Rianingsih (Ed) (1996) *Berbuat bersama berperan setara : Acuan penerapan participatory rural appraisal. Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara (KPDTNT) dan Ford Foundation*. Bandung : Driya Medika
- Grant A. E. & Wilkinson, J. S. 2009. *Understanding Media Convergence: The State of the Field*, NY: Oxford University Press
- Heru Sukoco, Dwi. 1995. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung : Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.
- Iskandar Jusman dan Soeharto Edi (1995) *Pembangunan dan perencanaan sosial (Kumpulan Tulisan)* Bandung : Perpustakaan DKM Al-Ihsan STKS
- Ife, Jim (1995) *Community Development : Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Australia : Longman.
- Purwowibiwo (2013) *Peran Pekerja Sosial dalam Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Millennium: UNPAD, Bandung*.
- Suharto, Edi, 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Percikan Pemikiran*, LSP Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajawaliPers, 1982)
- W. Setiawan (2016), *Pemanfaatan Teknologi untuk Menunjang Persiapan Calon Guru dalam Mengajar*, Seminar Nasional "Tekhnologi dalam Pembelajaran dan Pekerjaan" Program Skill to Succeed dari Save the Children. Bandung, 14 Maret 2016
- Zulkarnain Nasution (2009) *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat desa Transisi, suatu tinjauan sosiologis*, Surabaya:UMM Press.
- Peraturan Pemerintah R.I No. 45 Tahun 2017 *Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang RI No. 11 tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial* .